RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR IS	SI		ii
DAFTAR T.	ABEL		iii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II		IL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD SAMPAI GAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
	2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwula II Tahun 2024 Disparbud Kota Bogor	n
	2.2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
	2.3	Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor	16
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
BAB III	REN	CANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOI	?
			. 23
BAB IV	PENU	UTUP	. 33

DAFTAR TABEL

]	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Disparbud Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Disparbud Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Prorgram Disparbud Kota Bogor Triwulan I Tahun 2024	I 17
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2024	. 18
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024	27



WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

Mengingat

Undang-Undang Tahun 1. Nomor 16 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah Keputusan Menteri Dalam dengan Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 050-5889 tentang verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana beberapa diubah terakhir kali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



- 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Kota Bogor (Lembaran Bogor Tahun 2011 Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
- 25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
- 26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2024

Pasal 4

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024, meliputi:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV	Penutup

2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial:
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;



- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Pendapatan Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur:
- ii. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- jj. Rumah Sakit Umum Daerah.
- 3. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 25



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

Nomor: 25 Tahun 2024 Tanggal: 15 Agustus 2024

Tentang: Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Disparbud Kota Bogor Tahun 2024. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

- 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
- 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
- 31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 untuk memberikan arahan dan pedoman penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disparbud Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 adalah:

- 1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan disparbud tahun 2024.
- 2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
- 3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
- 4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
	II TAHUN 2024
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR
BAB IV	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2024 sampai dengan triwulan II, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Disparbud Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2019-2024 Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

			Target Kineria dan Anggaran					REALISASI KINERJA	A PADA TRIN	WULAN	Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat	Realisasi Kinerja dan	Tingkat	
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		/ID pada Tahun periode RPJMD)	RKPD tahun	a dan Anggaran berjalan (2024) lievaluasi		ı		II	dan Anggaran dievaluasi	RKPD yang	capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	K Rp
1	2	3	4		5		6		8		9	12 = 8+9+1	10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15= 14/5×100%
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
	2,22	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN			69.318.964.696		11.857.556.547		2.704.160.499		3.577.637.639	6.	.281.798.138			
	2 22 04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A poin	37.365.537.046	A poin	0.000 550 447		3 573 730 400	Α	2 044 647 224	_	540 247 020			
	2.22.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	3.74 poin	37.365.537.046	3.74 poin	9.999.558.147		2.573.730.499		2.944.617.331		.518.347.830			
	2.22.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	12.939.800	100 %	1.500.000		-		-		-			
1	2.22.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	12.939.800	5 dokumen	1.500.000		-		-					
	2.22.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	28.770.282.696	100 %	7.853.007.166	100%	2.238.185.967	10%	2.308.191.396	4.	.546.377.363			
2	2.22.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	28.770.886.696	35 orang/ bulan	7.783.611.166	34	2.224.096.167	36	2.294.198.196	4.	.518.294.363			
3	2.22.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 laporan	69.396.000	12 laporan	69.396.000	3	14.089.800	3	13.993.200		28.083.000			
	2.22.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	2.814.860.300	100 %	566.910.000		94.690.490		164.757.800		259.448.209			
4	2.22.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	365.076.100	1 paket	97.139.100		59.061.600		5.411.000		64.472.600			
5	2.22.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	59.819.800	1 paket	16.470.900		-		12.325.000		12.325.000			
6	2.22.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	38.400.000	1 dokumen	12.000.000		1.900.000		2.850.000		4.750.000			
7	2.22.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	2.351.564.400	1 laporan	441.300.000		33.728.809		144.171.800		177.900.609			
	2.22.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	100 %	814.143.000	100 %	115.787.200	100	79.619.000		28.450.00		108.069.000			
8	2.22.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 unit	814.143.000	5 unit	115.787.200		79.619.000		28.450.00		108.069.000			

								ı	REALISASI KINERJA	A PADA TRIV	VULAN	Realisasi Capaian Kineria		Tinalist	Realisasi Kinerja dan	Tingkat
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	•	ID pada Tahun periode RPJMD)	RKPD tahun	a dan Anggaran berjalan (2024) lievaluasi		I		II	dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	к	Rp	к	Rp	K Rp	K Rp	K Rp
1	2	3	4		5		6		8		9	12 =	8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15= 14/5×100%
	2.22.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.016.391.850	100 %	1.042.629.981		98.235.997		239.970.185		338.206.182			
9	2.22.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	726.523.310	1 laporan	348.003.785		42.589.500		44.325.234		86.914.734			
10	2.22.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	2.289.868.540	1 laporan	694.626.196		55.646.497		195.644.951		251.291.448			
	2.22.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	1.936.919.400	100 %	419.723.800		62.999.126		203.247.950	100	266.247.076			
11	2.22.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	460.570.000	15 unit	192.690.000		32.985.000		44.211.300		77.196.300			
12	2.22.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	533.111.600	105 unit	89.500.800		12.175.000		40.655.000		52.830.000			
13	2.22.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	943.237.800	1 unit	137.533.000		17.839.126		118.381.650		136.220.776			
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni	42 event	3.878.025.800	42 event	952.463.400	4	31.610.000		405.754.308		437.364.308			
	2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan	6 kegiatan	2.789.320.700	2 kegiatan	326.360.000		-		-		-			
14	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 kegiatan	2.789.320.700	2 kegiatan	226.360.000		-		-		-			
15	2.22.02.2.0 1.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 orang	126.250.000	50 orang	100.000.000		-		-		-			
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	3 kegiatan	1.088.705.100	1 kegiatan	626.103.400		31.610.000		405.754.308		437.364.308			
16	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 objek	1.088.705.100	2 objek	626.103.400		31.610.000		405.754.308		437.364.308			
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,65 %	3.036.415.100	76,65 %	40.795.000		-		40.590.000		40.590.000			
	2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi	30 orang/ lembaga	3.036.415.100	20 orang/ Lembaga	40.795.000		-		40.590.000		40.590.00			
17	2.22.03.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniar Tradisional	n Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 lembaga	3.036.415.100	20 orang/ Lembaga	40.795.000		-		40.590.00		40.590.000			
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah	50 orang	31.624.000	50 orang	31.624.000		-		-		-			
	2.22.04.2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku sejarah yang terbina	5o orang	31.624.000	50 orang	31.624.000		-		-		-			

								F	REALISASI KINERJ	A PADA TRIV			Tingkat	Realisasi Kinerja dan	Tingkat
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		1D pada Tahun periode RPJMD)	RKPD tahun	a dan Anggaran berjalan (2024) lievaluasi		1		dan Angg	Capaian Kinerja aran RKPD yang luasi (2024)	capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	K Rp	K Rp	K Rp
1	2	3	4		5		6		8		9 12	= 8+9+10+11	13 = 12/7×100%	14 = 6 + 12	15= 14/5×100%
18	2.22.04.2 1.0001	.0 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 orang	31.624000	30 orang	31.624.000		-		-	-			
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	32 unit	8.319.924.750	32 unit	650.678.000	32 unit	97.610.000		96.000.000	193.610.000			
	2.22.05.2 2	.0 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	32 objek	8.319.924.750	32 objek	650.678.000	32 objek	97.610.000	32 objek	96.000.000	193.610.000			
19	2.22.05.2 2.0001	.0 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	32 objek	8.319.924.750	32 objek	650.678.000	32 objek	97.610.000		96.000.000	193.610.000			
	2.22.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,72 %	16.687.420.000	55,72 %	182.420.000		1.210.000		90.676.000	91.886.000			
	2.22.06.2 1	.0 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	202.436 orang	16.687.420.000	202.436 orang	182.420.000	47.381	1.210.000		90.676.000	91.886.000			
20	2.22.06.2 1.0005	.0 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi	1 unit	16.687.420.000	1 unit	182.420.000		1.210.000		90.676.000	91.886.000			
		URUSAN PILIHAN			6.663.513.660		1.073.450.300		142.901.830		353.084.256	495.986.086			
		BIDANG URUSAN PARIWISATA			6.663.513.660		1.073.450.300		142.901.830		353.084.256	495.986.086			
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Tingkat Hunian akomodasi	70,46 %	1.276.189.500	70,46 %	109.999.900	56,14 %		%	190.802.100				
	3.20.02	PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan	23,67 %	1.2/6.189.500	23,67 %	109.999.900	15,80%	•	%	190.802.100	_			
	3.26.02.2 1	.0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya Tarik wisata baru	1 daya tarik	1.276.189.500	1 daya tarik	109.999.900		-		171.050.100	-			
21	3.26.02.2 1.0009	.0 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	3 dokumen	1.276.189.500	1 dokumen	109.999.900	-	-		-	-			
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisatawan	6.399.090 orang	2.655.655.360	6.399.090 orang	464.190.700	1.143.314 orang	46.808.100	1.476.767 orang	92.323.700 2.620.081 orang	139.131.800			
	3.26.03.2 1	.0 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan wisatawan	6.399.090 orang	2.655.655.360	6.399.090 orang	464.190.700	1.143.314 orang	46.808.100	- orang	92.323.700 2.620.081 orang	139.131.800			
22	3.26.03.2 1.01	.0 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri	4 dokumen	457.343.800	1 dokumen	186.489.100	-	-		3.850.000	3.850.000			
23	3.26.03.2 1.02	.0 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 laporan	1.832.921.500	4 laporan	228.898.000	-	3.160.100		88.473.700	91.633.800			
24	3.26.03.2 1.03	.0 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	365.390.060	1 dokumen	48.803.600	-	43.648.000	-	-	43.648.000			
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	67 produk	14.684.800	67 produk	14.684.800	21 produk	-	- produk		-			

						Target Kiner	a dan Anggaran	F	REALISASI KINERJ	A PADA TRIV	VULAN	Realisasi Capaian Kineria			Realisasi Kinerja dan	Tingkat
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	•	ID pada Tahun periode RPJMD)	RKPD tahun	berjalan (2024) lievaluasi		ı	II		dan Angga	ran RKPD yang uasi (2024)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
				К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	K Rp
1	2	3	4		5		6		8		9	12 =	8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15= 14/5×100%
	3.26.04.2.0 1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif	7 kegiatan	14.684.800	1 kegiatan	14.684.800	1 kegiatan	-	- kegiatan	-		-			
25	3.26.04.2.0 1.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 laporan	14.684.800	1 laporan	14.684.800	1	-		-		-			
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	2.716.984.000	0,83 %	508.639.700	•	96.093.730	_	260.760.556		356.854.286			
	3.20.03	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	67 pelaku	2.710.384.000	67 pelaku	308.039.700	3	90.093.730	_	200.700.330		356.854.286			
	3.26.05.2.0	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	300 orang	2.716.984.000	100 orang	431.650.400	-	96.093.730		260.760.556	356.854.286				
	1	Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	67 pelaku	2.710.364.000	30 orang	431.030.400	3	30.033.730	-	200.700.550	33337,200				
26	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 laporan	635.630.600	100 orang	83.800.000	-	45.538.830		-		45.538.830			
27	3.26.05.2.0 1.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100 orang	606.773.000	100 orang	25.000.000	-	50.554.900		-		50.554.900			
28	3.26.05.2.0 1.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 orang	1.374.580.400	100 orang	50.000.000	1	-		211.260.556		211.260.556			
29	3.26.05.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 orang	100.000.000	1 laporan	272.850.400	1	-		49.500.000		49.500.00			
	3.26.05.2.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi	135 orang	164.974.600	100 orang	76.989.300	-	-		-		-			
30		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120 orang	164.974.600	40	76.989.300	-	-		-		-			
		JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEB	SUDAYAAN DAN PARIWISATA		60.307.100.802		12.931.006.847		2.847.062.329		3.930.721.895		6.777.784.224			

Dari data tabel 2.1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Disparbud Kota Bogor masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan masih belum terlihatnya progres pancapaian target indikator program.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Disparbud Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/	Targe	t Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Pagu
140	riogianii, kegiatani, bubkegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Qty	Satuan	2024	ncansasi ragu
1	3	4		5	6	7
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				11.857.556.547	6.281.784.138
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Α	point	9.380.645.741	4.570.889.767
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100	persen	1.500.000	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	1.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100	persen	7.853.007.166	4.546.377.363
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/ bulan	7.783.611.166	4.518.294.363
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	laporan	69.396.000	28.083.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	persen	566.910.000	259.448.209
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	97.139.100	64.472.600
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	16.470.900	12.325.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	dokumen	12.000.000	4.750.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	441.300.000	177.900.609
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD		100	persen	115.787.200	108.069.000
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	unit	115.787.200	108.069.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Qty	Kinerja Satuan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
1	3	4		5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	1.042.629.981	338.206.182
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	348.003.785	86.914.734
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	694.626.196	251.291.448
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	85	persen	419.723.800	266.247.076
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	192.690.000	77.196.300
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	unit	89.500.800	52.830.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	137.533.000	136.220.776
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni	42	event	952.463.400	437.364.308
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan	2	kegiatan	326.360.000	0
14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	objek	226.360.000	0
15	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50	orang	100.000.000	0
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	1	kegiatan	626.103.400	437.364.308
16	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	objek	626.103.400	437.364.308
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,64	persen	40.795.000	40.590.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi	20	orang/ lembaga	40.795.000	40.590.000
17	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	lembaga	40.795.000	40.590.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah	50	orang	31.642.000	0
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku sejarah yang terbina	50	orang	31.642.000	0
18	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30	orang	31.642.000	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan		32	objek	650.678.000	193.610.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Gabupaten/ Kota Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		32	objek	650.678.000	193.610.000
19	Pelindungan Cagar Budaya	- ailinaungi		objek	650.678.000	193.610.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,72	%	182.420.000	91.886.000
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	202.436	Orang	182.420.000	91.886.000
20	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		1	unit	182.420.000	91.886.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Qty	Kinerja Satuan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Pagu
1	3	4		5	6	7
	BIDANG URUSAN PARIWISATA				1.073.450.300	495.986.086
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Tingkat Hunian akomodasi	70,46	%	109.999.900	0
	TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan	23,67	%	109.999.900	U
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata baru	1	daya tarik wisata	109.999.900	0
21	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1	dokumen	109.999.900	-
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisatawan	6.399.090	wisatawan	464.190.700	139.131.800
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan wisatawan	6.399.090	wisatawan	464.190.700	139.131.800
22	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	guatan Promosi melalui Media kk, Elektronik, dan Media Lainnya Flektronik& Media Lainnya Baik		dokumen	186.489.100	3.850.000
23	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	laporan	228.898.000	91.633.800
24	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	dokumen	48.803.600	43.648.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	67	produk	14.684.800	0
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif	1	kegiatan	14.684.800	0
25	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1	laporan	14.684.800	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83	persen	484.574.900	356.854.286
	EKONOMI KREATIF	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	67	orang	464.374.900	330.634.260
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	100	orang	463.849.400	356.854.286
	dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM ekraf yang ditingkatkan kualitasnya	30	orang	403.043.400	33010341200
26	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100	Orang	150.895.200	45.538.830
28	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100	orang	51.009.900	50.554.900
29	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100	orang	211.944.300	211.260.556
30	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			laporan	50.000.000	49.500.000
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi	100	orang	20.725.500	0
31	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40	orang	20.725.500	0
		Penaampingan Ekonomi Kreatij				

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu Disparbud Kota Bogor senilai Rp. 12.931.006.847. dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 6.777.784.224.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan Disparbud adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Disparbud Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Capaian s.d Triwulan II Tahun 2024
Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	76,54 %	76,52 %
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	82 Nilai	-
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan wisatawan	23,67 % 6.339.090 Orang	17,62 % 2.620.081 orang
kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Disparbud sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut di atas masih belum ada yang tercapai sehingga masih membutuhkan upaya untuk mencapai terget yang telah di tentukan, begitu juga dengan indikator kinerja program masih perlu upaya untuk mencapai target, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Program Disparbud Kota Bogor Triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Target	Capaian s.d Triwulan II
Penunjang Urusan	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A Nilai	A Nilai
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3.52 poin	3,47 poin
Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman jenis event/ festival/ pasanggiri/ lomba/ sayembara karyaseni	42 event	31 event
Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,54 %	76,52 %
Pembinaan Sejarah	Jumlah ketersediaan SDM pembinaan sejarah	50 orang	-
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	32 unit	32 unit
Program Peningkatan	Tingkat hunian akomodasi	70,46 %	60,74 %
Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	17,62 %
Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	6.399.090 orang	2.620.081 orang
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	67 produk	40 produk
Program pengembangan sumber daya pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	0,14 %
dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	67 pelaku	9 pelaku

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Berdasarkan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Disparbud Kota Bogor Tahun 2024

	Program / Kegiatan/ Sub		Rancangan Awal Perubahan RKPD 20)24				Renja Perubahan 2024		
No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	YANG TIDAK BERKAITA	AN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN	DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	G KEBUDAYAAN			15.991.890.746	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEBUDAYAAN			12.127.845.024
		DEA4EDINITALIANI	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	A poin				Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	A poin	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEIVIERIN TAHAN	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	3.50 poin	9.533.480.646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN P DAERAH KABUPATEN/KOTA	EWEKINTAHAN	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	3.74 poin	10.589.718.624
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A poin	1.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan E Perangkat Daerah	valuasi Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A poin	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat	Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	7.210.942.281	Administrasi Keuangan Perangkat I	Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	8.561.466.913
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ bulan	7.141.546.281	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	8.492.703.913
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	69.396.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	68.763.000
3	Administrasi Umum Perangkat Da	erah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	777.306.100	Administrasi Umum Perangkat Dae	rah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	506.110.400
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	108.339.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	95.599.100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.790.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16.470.900
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	27.495.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	-

	Dungung / Vaniaton / Cub		Rancangan Awal Perubahan RKPD 20	24				Renja Perubahan 2024		
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	609.681.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	382.040.400
4	Pengadaan Barang Milik Daerah P Pemerintah Daerah	enunjang Urusan	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	95 %	182.335.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Per Pemerintah Daerah	nunjang Urusan	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	95 %	115.787.200
٤	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	182.335.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	115.787.200
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Daerah	n Pemerintahan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	933.074.665	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	986.630.311
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	372.003.785	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	292.004.115
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	561.070.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	694.626.196
6	Pemeliharaan Barang Milik Daera Pemerintahan Daerah	h Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	428.321.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	419.723.800
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	189.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	192.690.000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	101.858.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	89.500.800
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	137.533.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	137.533.000
Ш	PROGRAM PENGEMBANGAN KEB	UDAYAAN	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni	21 event	1.724.483.600	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBU	DAYAAN	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri / Lomba/ Sayembara Karyaseni	42 event	877.463.400
7	Pengelolaan Kebudayaan yang Ma dalam Daerah Kabupaten/Kota	asyarakat Pelakunya	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	326.360.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Mas dalam Daerah Kabupaten/Kota	yarakat Pelakunya	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	251.360.000
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 objek	226.360.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 objek	151.360.000
16	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 orang	100.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 orang	100.000.000

	Program / Kegiatan/ Sub		Rancangan Awal Perubahan RKPD 20	024				Renja Perubahan 2024		
No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pelestarian Kesenian Tradisional y Pelakunya dalam Daerah Kabupat	• .	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	3 kegiatan	1.398.123.600	Pelestarian Kesenian Tradisional ya Pelakunya dalam Daerah Kabupate		Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	3 kegiatan	626.103.400
17	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 kegiatan	1.398.123.600	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 kegiatan	626.103.400
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KESE	ENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	10 %	80.595.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEN	NIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	76,65 %	40.795.000
9	Pembinaan Kesenian yang Masyar dalam Daerah Kabupaten/Kota	akat Pelakunya	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi	20 orang/ Lembaga	80.595.000	Pembinaan Kesenian yang Masyara Daerah Kabupaten/Kota	kat Pelakunya dalam	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi	20 orang/ Lembaga	40.795.000
18	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	80.595.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	40.795.000
v	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah	50 orang	31.642.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah	50 orang	31.642.000
10	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah	Jumlah pelaku sejarah yang terbina	50 orang	31.642.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (S Kabupaten/Kota	Satu) Daerah	Jumlah pelaku sejarah yang terbina	50 orang	31.642.000
19	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 orang	31.642.000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 orang	31.642.000
VI	PROGRAM PELESTARIAN DAN PEN BUDAYA	IGELOLAAN CAGAR	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	25 unit	650.711.500	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENG BUDAYA	GELOLAAN CAGAR	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	32 unit	495.806.000
11	Pengelolaan Cagar Budaya Peringk	cat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	25 objek	650.711.500	Pengelolaan Cagar Budaya Peringka	at Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	32 objek	495.806.000
20	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	20 objek	650.711.500	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	32 objek	495.806.000
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERMU	SEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	25 %	3.970.978.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUS	EUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,72 %	92.420.000
12	Pengelolaan Museum Kabupaten/	Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	130.000 orang	3.970.978.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/ H	Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	130.000 orang	92.420.000
21	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi	1 unit	3.970.978.000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi	1 unit	92.420.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	l				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PARIWISATA			2.541.476.600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PARIWISATA			889.364.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA T	ARIK DESTINASI	Tingkat Hunian akomodasi	70 %		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TA	RIK DESTINASI	Tingkat Hunian akomodasi	70,46 %	
VIII	PARIWISATA		Persentase Kunjungan Wisatawan	10 %	692.449.600	PARIWISATA		Persentase Kunjungan Wisatawan	23,67 %	100.679.900
13	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ka	bupaten/Kota	Jumlah daya Tarik wisata baru	1 daya Tarik	109.999.900	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab	upaten/Kota	Jumlah daya Tarik wisata baru	1 daya Tarik	100.679.900

	Dunasan / Vaniatan / Cub		Rancangan Awal Perubahan RKPD 20	024				Renja Perubahan 2024		
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				wisata					wisata	
22	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	109.999.900	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	100.679.900
14	Pengelolaan Kawasan Strategis Pa Kota	riwisata Kabupaten/	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	1 kawasan	199.999.900	Pengelolaan Kawasan Strategis Pari Kota	iwisata Kabupaten/	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	1 kawasan	-
23	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	199.999.900	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
15	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	1 destinasi	132.449.900	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Ka	abupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	1 destinasi	-
24	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 laporan	132.449.900	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 laporan	-
16	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pa Kabupaten/ Kota	riwisata Daerah	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi	30 pelaku	250.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Par Kabupaten/ Kota	iwisata Daerah	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi	30 pelaku	-
25	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 usaha	250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 usaha	-
IX	PROGRAM PEMASARAN PARIWISA	ATA	Jumlah kunjungan wisatawan	5.062.449 orang	869.612.500	PROGRAM PEMASARAN PARIWISA	TA	Jumlah kunjungan wisatawan	5.062.449 orang	354.724.700
16	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Tarik, Destinasi dan Kawasan Stra Kabupaten/ Kota	• .	Jumlah Kunjungan wisatawan	5.062.449 orang	869.612.500	Pemasaran Pariwisata Dalam dan L Destinasi dan Kawasan Strategis Pa Kota	• •	Jumlah Kunjungan wisatawan	5.062.449 orang	354.724.700
25	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	335.620.900	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	97.868.700
26	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	385.188.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	209.646.000
27	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	2 Promosi	148.803.600	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	2 Promosi	47.210.000

	D		Rancangan Awal Perubahan RKPD 20	24				Renja Perubahan 2024		
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kelurahan	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kelurahan	dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKO MELALUI PEMANFAATAN DAN PER KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	40 Produk	14.684.900	PROGRAM PENGEMBANGAN EKON PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGA INTELEKTUAL		Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	40 Produk	14.110.000
17	Pengembangan Ekosistem Ekonon	ni Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI	12 Pelaku	14.684.900	Pengembangan Ekosistem Ekonomi	Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI	12 Pelaku	14.110.000
28	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 laporan	14.684.900	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 laporan	14.110.000
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUM PARIWISATA DAN EKONOMI KREA		persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	964.729.600	PROGRAM PENGEMBANGAN SUME	BER DAYA PARIWISATA	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,83 %	419.849.400
	PARIWISATA DAN ERONOWII KREP	Allr	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30 pelaku]	DAN EKONOWII KREATIF		jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30 pelaku	
18	Pelaksanaan Peningkatan Kapasita	as Sumber Daya	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	750 orang	921.219.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	•	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	750 orang	419.849.400
	Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	30 pelaku	1	Manusia Pariwisata dan Ekonomi K	reatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	30 pelaku	
29	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	339.344.200	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	106.895.200
30	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	95 orang	281.325.100	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	95 orang	51.009.900
31	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 orang	250.549.700	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 orang	211.944.300
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 orang	50.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 orang	50.000.000
19	Pengembangan Kapasitas Pelaku I	Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi	200 orang	43.510.600	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ek	conomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi	200 orang	-
33	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 orang	43.510.600	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 orang	-
					18.533.367.346					13.017.209.024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja program (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah (2) Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
 - 5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan indikator kinerja program Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- D. Program Pembinaan Sejarah, dengan indikator kinerja program Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

- E. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan indikator kinerja program Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
- F. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan kunjungan ke museum, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
- G. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan indikator kinerja program (1) tingkat hunian akomodasi (2) Persentase kunjungan wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- H. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator kinerja program Jumlah Kunjungan Wisatawan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
 Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
 - 3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- I. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator kinerja program (1) Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi (2) Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - 1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

				TARGE ASI	N N						CAPAIAN KINERJA	A DAN KERANGKA PE	ENDANAAN				PR	AKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
N) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PERIO AN	TARGET	TARGE	T 2024	1	PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH
	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	DE RENST TAHU RA N OPD 2022	OPD TAHUN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYA	AN					18.533.367.346	12.931.006.847	13.017.209.024	-5.516.158.322							17.146.020.515	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA PELAYANAN DASAR	NG TIDAK BERKAITAN DENGAN					15.991.890.746	11.857.556.547	12.127.845.024	-3.864.045.722							14.346.020.515	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG K	KEBUDAYAAN					15.991.890.746	11.857.556.547	12.127.845.024	-3.864.045.722							14.346.020.515	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya			21 Event	42 Event	1.724.483.600	952.463.400	877.463.400	-847.020.200							1.900.000.000	
	2.22.02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan			2 kegiatan	2 kegiatan	326.360.000	326.360.000	251.360.000	-75.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku seni budaya dan masyarakat		400.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02 2.01.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			2 Objek	2 Objek	226.360.000	226.360.000	151.360.000	-75.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02 2.01.00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			50 Orang	50 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan			3 kegiatan	3 kegiatan	1.398.123.600	626.103.400	626.103.400	-772.020.200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			2 Objek	2 Objek	1.398.123.600	626.103.400	626.103.400	-772.020.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional			10,00%	76,65%	80.595.000	40.795.000	40.795.000	-39.800.000							100.000.000	
	2.22.03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi			20 orang/ lembaga	20 orang/ lembaga	80.595.000	40.795.000	40.795.000	-39.800.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03 2.01.00 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			20 Iembaga	20 Iembaga	80.595.000	40.795.000	40.795.000	-39.800.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah			50 orang	50 orang	31.642.000	31.642.000	31.642.000	0							50.000.000	
	2.22.04 2.01	. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku sejarah yang terbina			50 orang	50 orang	31.642.000	31.642.000	31.642.000	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelestari peninggalan sejarah		50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			50 Orang	50 Orang	31.642.000	31.642.000	31.642.000	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

				TARGE A	ASI PRAKIRAA	A					CAPAIAN KINERJA	A DAN KERANGKA PE	ENDANAAN					AKIRAAN MAJU RENCANA	
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	AKHIK A	AN CAPAIAN	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp	o)					PRIORITAS				PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENST TA	PD RENJA OPD OPD TAHUN N 2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5 (6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan			25 unit	32 unit	650.711.500	650.678.000	495.806.000	-154.905.500							800.000.000	
	2.22.05. 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan			25 objek	32 objek	650.711.500	650.678.000	495.806.000	-154.905.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05. 2.02.00 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			25 Objek	32 Objek	650.711.500	650.678.000	495.806.000	-154.905.500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum			25,00%	55,72%	3.970.978.000	182.420.000	92.420.000	-3.878.558.000							0	
	2.22.06. 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota			130000 orang	130000 orang	3.970.978.000	182.420.000	92.420.000	-3.878.558.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06. 2.01.00 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			1 Unit	1 Unit	3.970.978.000	182.420.000	92.420.000	-3.878.558.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah			A Point	A Point	9.533.480.646	9.999.558.147	10.589.718.624	1.056.237.978							11.496.020.515	
	3.26.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah			A point	A point	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		3.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			100%	100%	7.210.942.281	7.853.007.166	8.561.466.913	1.350.524.632			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/ bulan	/ 35 Orang/ bulan	7.141.546.281	7.783.611.166	8.492.703.913	1.351.157.632	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	69.396.000	69.396.000	68.763.000	-633.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah			100%	100%	777.306.100	566.910.000	506.110.400	-271.195.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	108.339.400	97.139.100	95.599.100	-12.740.300	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.06.00	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan			1 Paket	1 Paket	19.790.700	16.470.900	16.470.900	-3.319.800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

				TARGE ASI	N N						CAPAIAN KINER	IA DAN KERANGKA P	ENDANAAN				PR	AKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PERIO DENI	TARGET	TARGE	T 2024		PAGU INDIKATIF (R	o)					PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	DE OPD TAHU N OPD 2022	OPD TAHUN	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	- KELUIVIPUK SASARAN	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	05	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan									Kel/ Desa	(PAD)	Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi				
	3.26.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	C	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	27.495.000	C	0	-27.495.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	609.681.000	441.300.000	382.040.400	-227.640.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD			100%	100%	182.335.800	115.787.200	115.787.200	-66.548.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		200.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			15 Unit	15 Unit	182.335.800	115.787.200	115.787.200	-66.548.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah			100%	100%	933.074.665	1.042.629.981	986.630.311	53.555.646	5		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor		1.200.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	372.003.785	348.003.785	292.004.115	-79.999.670	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	561.070.880	694.626.196	694.626.196	133.555.316	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			700.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik			100%	100%	428.321.800	419.723.800	419.723.800	-8.598.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disparbud Kota Bogor			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			16 Unit	16 Unit	188.930.000	192.690.000	192.690.000	3.760.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	,		85 Unit	85 Unit	101.858.800	89.500.800	89.500.800	-12.358.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	137.533.000	137.533.000	137.533.000	(Kota Bogor, Semua) Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

				TARGE	ASI PRAKIR						CAPAIAN KINERJ	A DAN KERANGKA P	ENDANAAN			P	RAKIRAAN MAJU RENCANA	
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	AKHIR CA	AN CAPAIA	AN TARGE	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	DE RENST RA	PDD RENJA OPD OPD AHU N 2023	N SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 19	20	21
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.541.476.600	1.073.450.300	889.364.000	-1.652.112.600						2.800.000.000	
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.541.476.600	1.073.450.300	889.364.000	-1.652.112.600						2.800.000.000	
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase kunjungan wisatawan			10,00%	23,67%	692.449.600	109.999.900	100.679.900	-591.769.700						780.000.000	
1	3.20.02	TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat Hunian Akomodasi			70,00%	70,46%	032.443.000	103.333.300	100.075.500	-331.703.700						780.000.000	
	3.26.02. 2.01	. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata baru			1 daya tarik	1 daya tarik	109.999.900	109.999.900	100.679.900	-9.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan	150.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.01.00 09		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	109.999.900	109.999.900	100.679.900	-9.320.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		150.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.02	. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata			1 kawasan	1 kawasan	199.999.800	0	0	-199.999.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan	220.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.02.00 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			2 Dokumen	1 Dokumen	199.999.800	0	0	-199.999.800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		220.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.03	. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola			2 destinasi	2 destinasi	132.449.900	0	0	-132.449.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	pemangku kepentingan kepariwisataan	135.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.03.00 06		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			1 Laporan	1 Laporan	132.449.900	0	0	-132.449.900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		135.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.04	. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi			30 pelaku	30 pelaku	250.000.000	0	0	-250.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku usaha pariwisata	275.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02. 2.04.00 07	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			1 Usaha	1 Usaha	250.000.000	0	0	-250.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah		275.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

				TARGE A	ALIS ISI PRAKI N						CAPAIAN KINERJ	A DAN KERANGKA PI	ENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	ARTIN A	TARG	ET TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS	WEI ONABOW CACADAN		PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENST TA	PD REN. HU TAHI N 202	N SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN TAF		PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 19	20	21
		kabupaten/kota													penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal			
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan			5.062.449 orang	6.399.090 orang	869.612.500	464.190.700	354.724.700	-514.887.800						925.000.000	ı
	3.26.03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan			5062449 orang	6.399.090 orang	869.612.500	464.190.700	354.724.700	-514.887.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Wisatawan nusantara dan mancanegara	925.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03. 2.01.00 03		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumer	1 Dokumen	335.620.900	186.489.100	97.868.700	-237.752.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03. 2.01.00 06		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Kegiatan	2 Kegiatan	385.188.000	228.898.000	209.646.000	-175.542.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		400.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03. 2.01.00 07		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Promos	i 2 Promosi	148.803.600	48.803.600	47.210.000	-101.593.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		175.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar			40 Produl	67 Produk	14.684.900	14.684.800	14.110.000	-574.900						20.000.000	
	3.26.04 2.02	. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi HKI			12 Pelaku	12 Pelaku	14.684.900	14.684.800	14.110.000	-574.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Pelaku ekonomi kreatif	20.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04. 2.02.00 03		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			1 Laporar	1 Laporan	14.684.900	14.684.800	14.110.000	-574.900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Pembangunan Infrastruktur untuk penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal		20.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4	3.26.05		persentase SDM pariwisata yang disertifikasi			0,83%	0,83%	964.729.600	484.574.900	419.849.400	-544.880.200						1.075.000.000	
		EKONOMI KREATIF	jumlah pelaku ekonomi kreatif baru			30 orang	67 orang											
	3.26.05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya			750 orang	750 orang	921.219.000	463.849.400	419.849.400	-501.369.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1.025.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

				TARGE	CARAL	AKIRAA N					CAPAIAN KINER	JA DAN KERANGKA P	ENDANAAN				PR	AKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE			AKHIR PERIO	AN TA	APAIAN ARGET	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (R	p)					PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	DE RENST RA OPD	TAHU T.	RENJA OPD AHUN 2023	SEBELUM SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	- KELOWIPUK SASAKAN	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Saing					
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	339.344.200	150.895.200	106.895.200	-232.449.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05. 2.01.00 08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				95 Orang 30 Orang	281.325.100	51.009.900	51.009.900	-230.315.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			300.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				150 Orang 40 Orang	250.549.700	211.944.300	211.944.300	-38.605.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			300.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05. 2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang 30 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	C	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			75.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi				200 orang 200 orang	43.510.600	20.725.500	0	-43.510.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pelaku ekonomi kreatif		50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05. 2.02.00 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang 30 Orang	43.510.600	20.725.500	0	-43.510.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			JUMLAH					18.533.367.346	12.931.006.847	13.017.209.024	-5.516.158.322							17.146.020.515	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.